



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN FASILITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR

Sri Wulansari^{1*}, Mohammad Fakry Gaffar², Aan Komariah³, Suryadi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

*Email: sriwulansari@upi.edu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengekspolasi secara mendalam partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan di Sekolah Dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cicalengka 4 Bandung. Hasil penelitian menggambarkan lima kategori partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan, yaitu penyedia fasilitas, pengawas pembangunan, peran komite sekolah, Partisipasi tenaga, partisipasi dana. Dari lima peran tersebut, maka peran komite sekolah tentu akan berdampak besar dalam pemenuhan fasilitas pendidikan jika difungsikan secara maksimal.

Kata Kunci : Fasilitas Pendidikan, Komite Sekolah, Ruang Kelas Baru (RKB).

ABSTRACT

The purpose of this research is to deeply extrapolate community participation in the fulfillment of educational facilities in elementary schools. The research method used is qualitative method with case study approach. Data collection is done with interviews and documentation studies. This research was conducted at SDN Cicalengka 4 Bandung. The results describe five categories of community participation in the fulfillment of educational facilities, namely facility providers, development supervisors, the role of school committees, labor participation, fund participation. Of the five roles, the role of the school committee will certainly have a big impact in the fulfillment of educational facilities if functioned to the maximum.

Keyword: Educational Facilities, School committees, New classroom.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, pemerintah, lembaga termasuk masyarakat yang sekaligus sebagai user. Tanggungjawab ini juga mengacu pada pendekatan pembiayaan dimana semua unsur yang terlibat dalam pembangunan pendidikan, memiliki perannya masing-masing. Pada prosesnya pendidikan, selalu tidak luput dari aksep pembiayaan, baik pembiayaan yang mengarah pada operasional sekolah, maupun pembiayaan dalam kaitannya dengan pemenuhan fasilitas sekolah. Hal ini tentu mengisyaratkan kepada berbagai pihak untuk mengambil perannya masing-masing dalam rangka menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Keberhasilan tujuan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan fasilitas pendidikan yang sesuai

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sanjaya (2006), menjelaskan bahwa terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan fasilitas pendidikan, antara lain: (1) menumbuhkan gairah dan motivasi guru dalam mengajar serta dapat mendorong peserta didik untuk belajar, (2) memberikan kemudahan dalam menentukan berbagai pilihan pada peserta didik untuk belajar, sehingga proses pembelajaran akan lebih bervariasi. Hal senada juga disampaikan oleh Lunenburg (2010) bahwa *"School buildings across the nation are aging and becoming a barrier to optimal learning and teaching"* yang mengandung pengertian bahwa bangunan yang kurang mendukung akan menjadi penghambat proses pembelajaran yang optimal.

Kelengkapan fasilitas pendidikan akan membantu guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Joko Santosa (2011) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel manajemen sarana prasarana sekolah dengan motivasi berprestasi guru. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan fasilitas akan semakin meningkat motivasi berprestasi guru. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Timilehin (2012) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas sekolah dengan prestasi belajar siswa pada ranah afektif dan psikomotorik pembelajaran". Pentingnya fasilitas pendidikan dalam suatu lembaga sekolah dan penunjang untuk kegiatan belajar mengajar juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 juncto Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah, disebutkan bahwa: (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kaitannya dengan pemenuhan fasilitas pendidikan, terutama gedung dan fasilitas utama lainnya. Kondisi sekolah dasar di Kabupaten Bandung masih ada yang termasuk pada kategori rusak berat dan memprihatinkan sehingga mengancam keselamatan peserta didik yang tengah melakukan kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 2018 masih terdapat 554 kondisi ruang kelas yang kondisinya rusak berat, tahun 2019 meningkat menjadi 654 ruang kelas, dan pada tahun 2020 masih menyisakan 489 ruang kelas yang kondisinya masih rusak berat. Terlebih lagi pada pandemik Covid-19, menurut Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahun 2020 tidak ada pembangunan fasilitas pendidikan yang bersumber dari APBD karena adanya proses realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penelitian Fahrudin dkk (2020) yang menyatakan ada lima sekolah di kota Morowali Utara yang mengalami kerusakan. Begitu juga dengan penelitian Taufani dan Nugroho (2014) yang

menyatakan bahwa Indonesia memiliki masalah infrastruktur pendidikan yang serius dimana ribuan fasilitas sekolah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Pada tahun 2011 182.500 ruang kelas rusak sedang dan 110.598 ruang kelas rusak berat.

Melihat terbatasnya anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka disanalah perlu ada sumber lain yang menunjang dalam pemenuhan pembangunan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, ruang kelas dan fasilitas pendidikan lainnya. Jika dilihat dari tiga unsur yang bertanggungjawab dalam pendidikan yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat. Maka masyarakat dapat dijadikan sumber lain dalam memaksimalkan perannya untuk sama-sama membangun dan memenuhi fasilitas pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini mengarah pada penggalian data secara mendalam tentang seperti apakah partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan di Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membarikan gambaran secara jelas tentang bagaimana dan seperti apa partisipasi masyarakat dalam membangun kualitas pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran realitas yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan di sekolah dasar (Anselm, 2003). Penelitian yang juga dikembangkan berdasarkan pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan (Hariwijaya, 2007).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN Cicalengka 04. Secara wilayah berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang menerima bantuan pembangunan fasilitas pendidikan dari pemerintah selama tiga tahun berturut-turut.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara dan studi dokumentasi. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yakni Kepala Bidang SD, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD, kepala sekolah, wali kelas dan komite sekolah. Data yang diperlukan dalam proses penelitian adalah data berupa aktivitas proses partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan, hasil wawancara dengan responden serta dokumen-dokumen terkait pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Secara terarah pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengecekan (Bungin, 2012).

Analisis Data

Analisis data penelitian ini terdiri dari verifikasi, kategorisasi, reduksi dan relevansi, validasi, integrasi dan narasi. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini meliputi pemaknaan, penafsiran dan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian (Creswell, 2017).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian dikelompokkan kedalam dua sub bahasan utama yaitu sumber dana pembanguna fasilitas pendidikan dan gambaran partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan SDN Cicalengka 4 Bandung.

Sumber Dana Pembangunan Fasilitas Pendidikan

Temuan penelitian pada sub bahasan pertama yaitu sumber dana pembangunan fasilitas pendidikan yang didapatkan oleh SDN Cicalengka 4 Bandung, menggambarkan bahwa sumber daya pembangunan fasilitas pendidikan terdiri dari APBN dan APBD. Selama tiga tahun berturut-turut SDN Cicalengka 04 mendapatkan bantuan pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan dari pemerintah, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN melalui kegiatan DAK fisik bidang pendidikan. Berikut uraian besaran dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan di SDN Cicalengka 04.

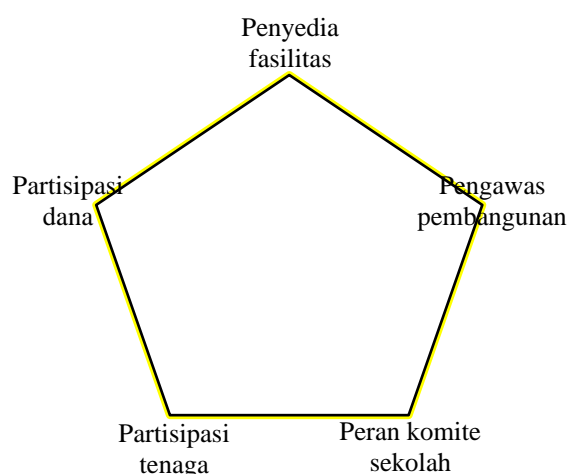
Tabel 1
Dana Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Pendidikan SDN Cicalengka 4 Bandung

No	Uraian	Vol	Tahun Anggaran	Sumber	Pagu Anggaran (Rp)
1	Ruang kelas baru (bertingkat)	2	2018	APBN	414.000.000
2	Rehabilitasi ruang kelas	1	2019	APBD Kabupaten	59.000.000
3	Buku Perpustakaan	1	2019	APBN	50.000.000
4	Alat peraga pendidikan B. Indo	1	2019	APBD Provinsi	49.950.000
5	Ruang kelas baru (bertngkat)	1	2020	APBN	275.000.000
6	Alat peraga matematika	1	2020	APBN	5.000.000
7	Alat peraga PJOK	1	2020	APBN	24.000.000

Sumber: Dokumen SDN Cicalengka 4 Bandung, (2020)

Partisipasi Masyarakat

Temuan penelitian pada sub bahasan partisipasi masyarakat berhubungan dengan uraian seperti apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan fasilitas pendidikan di SDN Cicalengka 4 Bandung. Paling tidak ada lima bentuk peran serta masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan, yaitu penyedia fasilitas, pengawas pembangunan, peran komite sekolah, Partisipasi tenaga, partisipasi dana. Hal tersebut senada dengan pendapat Hamijoyo (2007) paling tidak partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kualitas pendidikan menyangkut partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi barang dan partisipasi dana.



Gambar 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Fasilitas Pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan yang pertama adalah penyedia fasilitas. Peran ini digambarkan dengan orang tua siswa berpangku tangan senantiasa berusaha memenuhi fasilitas pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah. Hal kecil yang sering dilakukan adalah bersama-sama dengan wali kelas setiap awal tahun ajaran merencanakan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi untuk kelasnya. Dalam hal ini tidak jarang orang tua mengajukan pendapat untuk memenuhi fasilitas pendidikan yang ada di kelas tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan salah seorang wali kelas:

“Setiap awal ajaran baru, sekolah memberi keleluasaan bersama-sama dengan orang tua siswa untuk melengkapi fasilitas kelas seperti alat kebersihan, jam dinding, dan peralatan lainnya.” (WK. 01)

Peran pengawasan pembangunan menjadi partisipasi masyarakat yang lain. Dalam hal ini setiap bantuan dana pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan yang didapatkan oleh sekolah, maka masyarakat dengan sendirinya berperan sebagai pengawas. Proses pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, dan pengadaan fasilitas lainnya tentu akan diketahui dan diawasi oleh orang tua siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai pengawas pembangunan. Kaitannya dengan ini, kepala sekolah menyampaikan:

“Orang tua siswa yang diwakili oleh komite sekolah diharapkan dapat bersama-sama membangun fasilitas sekolah. Terutama saat pembangunan, meskipun ada dana

pemerintah terkadang tidak cukup sehingga perlu tambahan dana pendamping. Dana yang sedikit harus diawasi oleh semua pihak, termasuk masyarakat.” (KS. 01)

Meskipun belum maksimal ada peran ketiga masyarakat yang wakili oleh komite sekolah. Namun ini adalah salah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif. Bahkan peran komite sekolah ini bukan hanya tentang pemenuhan fasilitas pendidikan, akan tetapi juga kualitas pelaksanaan pembelajaran dan juga bentuk lainnya.

Selain peran komite sekolah, ada peran yang juga mencolok dalam hal pemenuhan fasilitas pendidikan yaitu partisipasi tenaga. Dalam hal ini masyarakat diperbantukan dan diminta melalui program pembangunan untuk ikut serta membangun fasilitas sekolah. Peran ini sangat penting, karena program hibah pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas tidak akan pernah terlaksana jika tidak ada masyarakat yang membantu dalam pembangunan tersebut.

Adapun partisipasi dana adalah peran yang paling kecil. Terlebih dari aturan pemerintah saat ini tidak diperbolehkannya memungkut iuran apapun untuk kepentingan sekolah. Adanya dana BOS sebagai salah satu alternatif operasional sekolah terpenuhi. Namun dalam peran ini mungkin dapat ambil dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan negara dengan ketaatannya membayar pajak. Pajak yang menjadi salah satu unsur dari APBN dan APBD tentu menunjukkan bahwa hibah pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah bersumber dari sana. Dari sinilah maka partisipasi dana masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu perannya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendidikan di SDN Cicalengka 4 Bandung dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu penyedia fasilitas, pengawas pembangunan, peran komite sekolah, Partisipasi tenaga, partisipasi dana. Dari lima peran tersebut, maka peran komite sekolah tentu akan berdampak besar dalam pemenuhan fasilitas pendidikan jika difungsikan secara maksimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anselm, Strauss & Juliet, Corbin. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan. (2012). *Analisis Data penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John, W. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitataif, dan Campuran Edisi Ke Empat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fahrudin, F., Mangitung, D. M., & Rizal, A. (2020). Identification of Damage Level and Cost Estimate of Building Maintenance of Elementary School. *In MATEC Web of Conferences (Vol. 331)*. EDP Sciences.
- Hariwijaya, M, (2007) *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Yogyakarta: elMatera Publishing.

- Lunenburg, C. Fred. (2011). Self-Efficacy in the Workplace: Implications for Motivation and Performance. Sam Houston State University, *International Journal Of Management, Business, and Administration*. Vol. 14, Number 1.
- Sanjaya, Wina. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santosa, Joko. (2011). *Hubungan Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, Dampak Sertifikasi Guru, Iklim Sekolah, Dan Motivasi Berprestasi Guru dengan Kinerja Guru pada SMK Negeri di Malang Raya*. Disertasi.
- Taufani, A. R., & Nugroho, A. S. B. (2014). Proposed bamboo school buildings for elementary schools in Indonesia. *Procedia Engineering*, 95, 5-14.
- Timilehin, E.H. (2012). School facilities as correlates of students' achievement in the affective and psychomotor domains of learning. *European Scientific Journal*, 8, 208-215.